
**PERTENTANGAN IDEOLOGI ANTAR TOKOH NASIONAL DALAM Mencari
FORMAT KENEGARAAN AWAL KEMERDEKAAN DI INDONESIA**

Vaninsia Patiku¹, Yohanes Burdam², Aksilas Dasfordate³

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Manado

Email: vaninsiapatiku99@gmail.com, yohanesburdam@unima.ac.id, aksilasdastfordate@unima.ac.id

Article History

Received : 2022-03-08 Accepted : 2022-03-15 Published : 2022-06-30

Abstrak- Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan para tokoh nasional Indonesia dalam upaya membangun sistem kenegaraan pada periode awal kemerdekaan Indonesia; menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya pertentangan para tokoh nasional di tengah upaya perubahan sistem kenegaraan Indonesia; dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pertentangan tersebut terutama dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian dan analisis data yaitu metode sejarah menurut Marc Bloch dengan pendekatan strukturistik. Hasil penelitian: (1) diarahkan untuk memperbaiki bahkan mengubah sistem kenegaraan lama buatan kolonial Belanda menjadi sistem kenegaraan yang khas Indonesia dengan memerhatikan aspek pluralisme di Indonesia dalam bidang, agama, bahasa, suku, ras dan golongan, baik politik, sosial maupun budaya; (2) Perjuangan para tokoh nasional dalam upaya memperbaiki sistem kenegaraan Indonesia kala itu membutuhkan berbagai sudut pandang yang tentu memiliki perbedaan. Faktor utama pertentangan di antara para tokoh nasional adalah persoalan ideologi masing-masing tokoh nasional. (3) semakin lemahnya sistem perjuangan yang dibangun para tokoh nasional Indonesia, utamanya di bidang politik. Dampak lain ialah terjadinya Agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Di samping itu, kekacauan-kekacauan politik seperti munculnya peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.

Kata Kunci : *Pertentangan Ideologi, Tokoh Nasional, Format Kenegaraan, Awal Kemerdekaan.*

**IDEOLOGICAL CONFLICT BETWEEN NATIONAL LEADERS IN FINDING THE
FORMAT OF STATE OF EARLY INDEPENDENCE IN INDONESIA**

Vaninsia Patiku¹, Yohanes Burdam², Aksilas Dasfordate³

Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Manado

Email: vaninsiapatiku99@gmail.com, yohanesburdam@unima.ac.id, aksilasdastfordate@unima.ac.id

ABSTRAC

Abstrac-This study aims to describe the role of Indonesian national figures in efforts to build an ideal state system, especially in the early period of Indonesian independence; describe the factors that cause the occurrence of conflicts of national figures in the midst of efforts to change the Indonesian state system; and analyze the impact of these conflicts, especially in the aspect of governance in Indonesia. The approach used is a structurist approach or structurism which holds that history is created because of the thoughts and actions of humans (ratio and action). The method of research and data analysis is the historical method according to Marc Bloch (1988). First, to formulate problems and historical observations in order to obtain sources related to the problem carefully. Second, conducting historical criticism or testing of information data obtained from various sources. Third, generalize or categorize data according to the problem; and Fourth,

conducting a causal search (analysis) of the problem under study, namely the role of Indonesian national figures and ideological conflicts in the midst of changes in the state system. Conclusion of research results: (1) directed at improving and even changing the old state system made by the Dutch colonial into a state system that is uniquely Indonesian by paying attention to aspects of pluralism in Indonesia in the fields of religion, language, ethnicity, race and class, whether political, social or cultural; (2) The struggle of national figures in an effort to improve the Indonesian state system at that time required various points of view which of course had differences. The main factor of conflict between national figures is the ideological issue of each national figure. Differences occur because each character justifies the ideology he adheres to, such as; ideological, socialist, nationalist, democratic, and so on. Also because of the colonial politics of fighting between Indonesian national figures, so that in the history of the struggle of the Indonesian people there are known cooperative and non-cooperative paths, in addition to the different educational backgrounds of Indonesian national figures; and (3) The impact in the aspect of governance in Indonesia, namely the weakening of the struggle system built by Indonesian national figures, especially in the political field.

Keywords: *Ideological Contradictions, National Figures, State Format, Early Independence.*

Pendahuluan

Dalam sejarah, Indonesia pernah merasakan perihnya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) maupun bangsa Timur (Jepang). Kedaulatan Indonesia diperoleh lewat militansi perjuangan rakyat Indonesia yang berdarah-darah tanpa campurtangan para penjajah. Perjuangan memperoleh legitimasi kemerdekaan berawal dari perjuangan yang bersifat kedaerahan hingga perjuangan yang terakomodir dalam suatu organisasi perjuangan nasional. Budi Utomo merupakan organisasi perjuangan pertama yang kemudian berhasil mempengaruhi terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan lain yang menanamkan prinsip-prinsip nasionalisme, bersifat politik, keagamaan, dan sosial budaya. Lewat perjuangan organisasi-organisasi nasional tersebut, dapat membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan dari tangan penjajah, timbul pertanyaan; apa yang dimaksudkan dengan “kemerdekaan” itu? Apakah sesungguhnya masyarakat Indonesia ikut merasakan kemerdekaan pada saat itu? Sebuah pertanyaan yang mudah namun implikasinya luas dan jawabannya tergolong sulit yang telah memecahkan persatuan bangsa sendiri. Peristiwa ini manakala ditelusuri latar belakangnya akan muncul pemikiran bahwa sesungguhnya terselubung keinginan serta kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atau golongan tertentu (Sudiyo, 2000).

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertentangan antara para tokoh nasional, yaitu pertentangan antara Soekarno dan Sutan Sjahrir tentang sistem kenegaraan.. Sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh presiden Soekarno bertahan selama tiga bulan setelah itu beralih ke sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Peralihan sistem kepemimpinan tersebut mengakibatkan konflik kepentingan karena ketidakpuasan dari gerakan pemuda terhadap transisi perubahan yang terjadi.

Menurut Sudiyo (2000:70) Indonesia setelah proklamasi kemerdekaanya

mengalami kemelutan politik dan ekonomi yang sangat dasyat. Hal ini merambat pada semua lini kehidupan masyarakat dan tentunya menjadi sebuah beban bagi pemerintah baru yang memimpin pada saat itu dan peristiwa-peristiwa pembontakan organisasi yang sebelumnya terjadi (Genoveva Ambar Wulan, 2008:287).

Menurut Benedict Anderson (1998:2017) peristiwa peralihan kepemimpinan tersebut merupakan kudeta atas dasar gerakan pemuda revolusioner di ibu kota dan buakan ditanggapi oleh kepentingan partai politik manapun, yang kemudian menempatkan Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri.

Pertentangan yang terjadi antara Soekarno dan Sutan Sjahrir yang terjadi pada masa peralihan tersebut ternyata tidak terlepas dari latar belakang hubungan Soekarno dan Sutan Sjahrir dalam suasana politik yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Kerenggangan hubungan kedua tokoh tersebut mula-mula terjadi di Bandung pada tahun 1927. Sebuah kota yang dipilih Sutan Sjahrir untuk melanjutkan studinya di *Algemeene Middlebaar School* (AMS). Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian menjadi wadah untuk memupuk pemikiran radikalnya yang dikenal dengan istilah non-kooperasi. Soekarno pada saat itu usianya lebih tua sembilan tahun dari Sutan Sjahrir dan dikenal dengan politik radikalnya dalam mengganyang kolonialisme Belanda (Genoveva Ambar Wulan, 2008:288). Pertemuan yang dilakukan di Bandung pada tahun 1928 (pertemuan Pemuda Indonesia) Sutan Sjahrir yang pada waktu itu berusia dua puluh tahun telah melayangkan kritik kepada Soekarno yang lebih senior darinya agar supaya tidak menggunakan bahasa Belanda dalam pertemuan tersebut (Genoveva Ambar Wulan, 2008:288). Ketika Sutan Sjahrir tiba di Belanda untuk melanjutkan studinya Sjahrir kemudian terakomodir dalam organisasi pergerakan Indonesia di Belanda (Perhimpunan Indonesia) yang pada waktu itu dipimpin oleh Mohammad Hatta, kritikan yang dilontarkan kepada Soekarno semakin tajam dengan menulis esai dalam sebuah jurnal sosial di Amsterdam yang berjudul

“Pergerakan Indonesia pada Jalan Buntu. Jalan Keluar” esai tersebut dimaksudkan untuk mengkritik PNI yang pada waktu itu memilih berafiliasi dengan Budi Utomo dan organisasi lain yang dinilai bersikap moderat dan cenderung pro Belanda (Rudolf Mrazek, 1999:84).

Setelah kekuatan Belanda dipukul mundur oleh Jepang pada tahun 1942 Hatta kemudian berafiliasi dengan Soekarno dan mendukung pemerintahan Jepang di Indonesia yang pada waktu itu baru seumur jagung. Hal ini kemudian membangkitkan kemarahan Sutan Sjahrir dengan membangun gerakan bawah tanah yang kemudian didukung oleh para pemuda namun gerakan tersebut kemudian dihalau dan ditangkap oleh Jepang (Rudolf Mrazek, 1999:397).

Pada peristiwa Rengasdengklok menimbulkan kecurigaan Sutan Sjahrir terhadap Soekarno dan Hatta yang dianggap pro Jepang, kecurigaan tersebut berakhir dengan penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh para pemuda dan diasingkan di Rengasdengklok dengan tujuan memaksa Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa dipengaruhi oleh Jepang (Genoveva Ambar Wulan, 2008:289).

Pada masa peralihan kekuasaan dari presidensial ke parlementer yang kemudian mengakibatkan konflik antara Soekarno dan Sutan Sjahrir merupakan akses politik yang berhasil memboyong pemuda revolusioner Indonesia dalam tubuh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Berkiprahnya pemuda Indonesia, dapat dipahami sebagai katalisator yang mempengaruhi fungsi Badan Pekerja KNIP yang pada waktu itu dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan kemudian terbentuknya kabinet Sjahrir merupakan langkah yang sangat signifikan dalam peralihan kepemimpinan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturisme. Pendekatan strukturisme adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan peristiwa (*event*) dengan pendekatan struktural. Karena, ekplanasi sejarah dari aspek peristiwa tidak bermakna tanpa ditampilkan struktur-struktur dan determinan-

determinan lainnya yang terkandung di dalamnya. Asumsinya bahwa dalam historiografi ditampilkan perubahan atau diskontinuitas dalam bentuk peristiwa, sedangkan struktur sebagai aspek kontinuitasnya. Apabila perubahan dan kontinuitas dalam analisis sejarah dipadukan antara urutan peristiwa dengan jalinan struktur-struktur yang ada, maka struktur biasanya muncul dalam pemikiran para pelaku peristiwa (sejarah). Dalam konteks penelitian ini yaitu pertentangan ideologi antara para tokoh nasional dalam mencari format kenegaraan awal kemerdekaan di Indonesia inilah, muncul pemikiran dari berbagai pihak sehingga mendorong lahirnya tokoh-tokoh politik Indonesia yang salah satunya adalah Sutan Sjahrir dengan pemikiran sosialisme yang selanjutnya dijadikan bekal untuk berupaya berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perpaduan pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan strukturisme (Christopher Lloyd, 1993:45-46).

Dalam pendekatan strukturisme, dipadukan dasar-dasar dari pendekatan peristiwa dengan dasar-dasar dari pendekatan struktural, yakni hal-hal unik (dalam pendekatan peristiwa) dengan hal-hal yang universal (struktur sosial dalam pendekatan struktural). Selain ini, dimanfaatkan pula hermeneutika untuk menjelaskan *causal factor*. Oleh sebab itu, pendekatan ini juga memerlukan bentuk kisah untuk melengkapi analisis dengan memanfaatkan konsep-konsep ilmu sosial yang biasanya digunakan untuk membangun teori-teori ataupun model-model (Christopher Lloyd, 1993). Lingkungan sejarah, sosial dan kultural dalam alur pemikiran di atas, adalah lingkungan social-kultural para tokoh nasional yang di antaranya adalah Sutan Sjahrir, yang dengan bekal pendidikan di Eropa (Belanda) memiliki pemikiran-pemikiran yang bersifat sosial-politik dan berusaha untuk menransformasi ke dalam struktur kekuasaan pemerintahan guna memperbaiki sistem perjuangan yang sebelumnya lebih mengandalkan fisik dan beralih ke perjuangan yang lebih bersifat sosialis diplomatik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah sebagaimana yang di jelaskan oleh Marc Bloch. Ada empat tahap yang dilakukan dalam metode ini yaitu : *pertama*, perumusan masalah penelitian dan kemudian melakukan observasi histori untuk memperoleh sumber tentang pertentangan ideologi antara para tokoh nasional dalam mencari sistem kenegaraan yang tepat pada awal kemerdekaan Indonesia; *kedua*, melakukan kritik sejarah tentang pertentangan ideologi para tokoh nasional dalam mencari sistem kenegaraan yang tepat pada awal kemerdekaan Indonesia berdasarkan pada sumber yang ditemukan; *ketiga*, melakukan generalisasi terhadap permasalahan yang diteliti yakni, pertentangan ideologi antara para tokoh nasional dalam mencari sistem kenegaraan pada awal kemerdekaan; *keempat*, melakukan analisis kausalitas terhadap masalah yang diteliti yaitu pertentangan ideologi para tokoh nasional dalam mencari sistem kenegaraan pada awal kemerdekaan Indonesia (Marc Bloch, 1988:80).

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi kepustakaan, dengan tahap kegiatan sebagai berikut : *pertama*, mengumpulkan sumber tentang pertentangan ideologi para tokoh nasional dalam mencari sistem pemerintahan yang tepat pada awal kemerdekaan Indonesia (Penulis et al., 2022). *Kedua*, melakukan komparasi antara sumber primer dan sumber sekunder ditambah dengan melakukan kritik ekstern terhadap keaslian sumber dan kritik intern terhadap isi sumber pertentangan ideologi para tokoh nasional dalam mencari sistem kenegaraan yang tepat pada awal kemerdekaan Indonesia. Tahap ketiga, melakukan generalisasi dan kategorisasi dimaksudkan untuk menjaga konsistensi alur pikir agar sesuai dengan pendekatan dan teori yang digunakan dalam mengkaji pertentangan ideologi para tokoh nasional dan mencari sistem kenegaraan yang tepat pada awal kemerdekaan Indonesia. *Keempat*, melakukan analisis serta interpretasi dan penulisan sejarah dari masalah yang dikaji dengan melihat fakta sejarah yang ditemukan sehingga dapat membentuk cerita sejarah mengenai peran ideologi para tokoh nasional

dalam mencari sistem kenegaraan yang tepat pada awal kemerdekaan (H.Ismaun, 2005).

Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan kritik sejarah, generalisasi dan kategorisasi data dan fakta lalu kemudian melakukan analisis, interpretasi dan penulisan fakta sejarah terhadap masalah yang dikaji yaitu pertentangan ideologi para tokoh nasional dalam mencari sistem kenegaraan yang benar pada awala kemerdekaan Indonesia (H.Ismaun, 2005:59-61).

Merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalisme maka teori yang digunakan dalam eksplanasi fakta adalah teori strukturasi yang mencakup struktur dan agensi seperti yang dikemukakan oleh Anthony Giddens yang kemudian dikembangkan oleh Christopher Lloyd dan Charles Tilly dalam penelitian dan analisis sejarah tentang revolusi.

Anthony Giddens menjelaskan bahwa struktur adalah *rules and resources* yang dipakai dalam produksi dan reproduksi sistem sosial (Anthony Giddens, 1984:21-22). Sedangkan agensi dipahami oleh Giddens sebagai individu dan dalam konteks tertentu sebagai *prepetrator* (Anthony Giddens, 1984:9). Struktur tidak bisa dipisahkan dari agensi karena hubungan diantara keduanya merupakan hubungan dialektis yang sangat erat dan berlangsung terus-menerus tanpa henti. Struktur dapat mempengaruhi agensi dalam dua hal yaitu memampukan dan menghambat (Anthony Giddens, 1993).

Hasil dan Pembahasan

Semangat perjuangan kaum nasionalis yang membara namun diperhadapkan dengan kesulitan ekonomi akibat kebijakan politik kolonialisme Belanda maka perjuangan kaum nasionalis harus berubah haluan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kooperasi. Tambah lagi dengan konstelasi politik dunia internasional pada waktu itu yang memperlihatkan munculnya fasisme Jerman dibawah kendali Hitler dan pemerintahan militer Jepang dengan ekspansionisme yang ingin menguasai pasifik sehingga mengakibatkan dikotomi antara negara-negara yang menganut paham demokrasi dan

negara-negara yang menganut paham komunis, maka tidak ada alternatif lain yang diambil oleh kaum perjuangan nasional selain membangun kerja sama dengan kolonialisme Belanda untuk mempertahankan demokrasi. Kesadaran untuk mempertahankan demokrasi dan membangun kerja sama dengan Belanda, terutama dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia (PI) yang pada waktu itu berpijak di negeri Belanda. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992) bahwa konteks politik Eropa Barat sangat nyata bahayanya, sehingga PI terpaksa menjalankan politik kooperasi dan bukan sekedar strategi politik semata melainkan berdasarkan pada prinsip ideologi. Berbeda halnya dengan dinamika politik di dalam negeri pada waktu itu yang hanya memanfaatkan politik kooperasi sebagai strategi dalam perjuangan dan sama sekali tidak terpengaruh oleh prinsip ideologi (Sartono Kartodirdjo, 1992).

Perang dalam Memperjuangkan Persatuan dan Kesatuan

Pada Mei 1940 negeri Belanda diserang oleh tentara Jerman peristiwa ini kemudian menyebar ke seluruh Indonesia dan disambut dengan rasa empati kepada bangsa Belanda. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum nasionalis untuk bekerja sama agar usaha perang dapat ditingkatkan karena dengan jatuhnya negeri Belanda ke tangan Jerman maka Indonesia mendapat dukungan dan kedudukan yang penting di dunia Internasional. Dengan demikian Indonesia harus berpartisipasi dengan penuh semangat untuk membangun kepercayaan yang lebih besar dari pihak Belanda. Hal ini kemudian disambut oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan melarang mengadakan perkumpulan dan rapat-rapat umum. Jika kaum nasionalis ingin mengadakan rapat maka harus diperoleh izin dari pemerintahan kolonialisme Belanda (Sartono Kartodirdjo, 1992:181).

Perjuangan Masa Kolonial Belanda

Menjelang tahun 1942 masuknya tentara jepang ke Indonesia yang kemudian mengakibatkan keruntuhan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda namun masih saja terjadi akselesrasi serta polarisasi antara

kaum nasionalisme dan pemerintahann kolonialisme. Pihak nasionalisme lebih progresif sedangkan di lain pihak kolonialisme Belanda cenderung konservatif, masing-masing mempertahankan persepsinya. Antagonisme antara kedua pihak tersebut berujung pada haluan politik kaum nasionalis yang akhirnya memilih untuk menjadi semakin mederat dan loyal agar supaya dapat kembali menjalin kerja sama dengan tujuan membuat perubahan sistem ketatanegaraan menjadi lebih demokratis untuk segera mengakselerasi penentuan berdiri sendiri dan terlepas dari tangan besi penjajahan. Tujuan yang ingin diperoleh kaum nasionalis tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan isi pidatonya Ratu Wilhelmina di tahun 1941 serta sesuai pula dengan isi Piagam atlentik pada tahun yang sama.

Untuk menghapuskan seluruh penjajahan di dunia maka sekutu berupaya mengganyang totalitarianisme dengngan cara memproklamasikan Piagam Atlantik agar supaya bangsa-bangsa yang terbelenggu oleh kejamnya penjajahan memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini sesungguhnya yang diinginkan oleh kaum nasionalis, perjuangan tanpa anarkis dan tak radikal (Sartono Kartodirdjo, 1992).

Proses Politik Indonesia Menuju Kemerdekaan

Wajah baru dalam gerakan kaum nasioanalis terjadi ketika Jendral Fock menjalankan politik konservatifnya. Gerakan yang sebelumnya cenderung radikal berubah ke arah gerakan politik murni. Seatu golongan yang mendukung organisasi pergerakan sangat menentukan kadar radikalismenya. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berupaya menyediakan alternatif lain namun terlihat gagal, kaum intelegensia yang membentuk organisasi politik baru semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah dirintis oleh PI.

Manifesto politik dari hasil pemikiran PI menjadi dasar pergerakan kaum nasionalis. Kaum intelegensia pada tahun 1920 telah mampu dengan cepat memulihkan masalah masalah sosial yang terjadi. Idealisme PI yang memahami tentang perkembangan politik dunia tersebut, sangat memberikan manfaat

besar bagi perubahan politik di Indonesia yang kemudian terwujudnya demokratisasi dalam segala aspek pemerintahan kolonial Belanda.

Menurut J. Ingleson (1979), idealisme politik yang berkembang di kalangan PI mencerminkan lokasi sosial-historis para pendukungnya yang mengandung antara lain faktor-faktor seperti : (1) suasana politik bebas di negeri Belanda dengan kebebasan berkumpul dan berbicara; (2) para anggota PI sebagai mahasiswa pada umumnya tidak mempunyai ikatan dengan kepentingan tertentu (*uncommitted*); dan (3) solidaritas antaretnik mudah terpupuk, lebih-lebih dikalangan kecil sesama golongan akademik (Sartono Kartodirdjo, 1992:154-163).

Munculnya Ideologi Politik

Masing-masing organisasi politik nasional memiliki ideologinya tersendiri, SI (PSI) yang berlandaskan ajaran Islam dengan sangat mudah mendapat dukungan dari masyarakat dan berupaya untuk melakukan mobilisasi sosial, berbeda dengan organisasi politik nasional yang berhaluan sekuler seperti halnya dengan PNI di bawah pimpinan Soekarno. Dapat dikatakan bahwa organisasi nasionalis yang berbasis sekuler tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan tentu tidak dengan muda memobilisasi massa. Namun PNI dan Pertindo yang merupakan organisasi politik yang berhaluan sekuler tersebut sangat membutuhkan ideologi yang non-religius yang memberikan sumbangsi pemikiran marheanisme, nasionalisme, dan demokrasi yang kemudian menjadi dasar bagi perjuangan kaum nasionalis.

Soekarno berpandangan bahwa upaya untuk mengganyang kapitalisme yang merupakan embrio dari kolonialisme harus melalui “aksi massa”, di mana kaum proletarian yang terindas harus diikutsertakan dalam perjuangan tersebut. Dengan tumbanganya kolonialisme maka dengan mudah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya Soekarno menegaskan bahwa perjuangan anti-kolonialiseme merupakan jembatan emas

untuk menuju pada adil-makmur bagi masyarakat.

PNI baru menyangsikan haluan politik Soekarno dengan alasan bahwa politik agitasi yang dilakukan oleh Soekarno kurang efektif. PNI baru menegaskan bahwa kaderisasi merupakan cara efektif untuk meningkatkan proses politik bukan sebaliknya seperti yang dilakukan Soekarno. Strategi yang dilakukan oleh PNI baru ternyata lebih tepat, ketika Soekarno ditangkap pada tahun 1929 pengikut Soekarno tidak berdaya karena lebih cenderung mengandalkan kepemimpinan Soekarno dan politik agitasinya. Lebih dari itu strategi politik Soekarno menimbulkan strata sosial dikalangan pengikutnya, di mana kaum kapitalis nasional terakomodasi, padahal tujuan dari perjuangan kaum nasionalis itu sendiri adalah untuk menumpaskan kapitalisme baik di kalangan pemerintah kolonial maupun kaum borjuis nasional. Pada dasarnya konsepsi perjuangan Soekarno menentang rasialisme yang didasarkan pada anti kolonialisme namun hal itu oleh pemerintahan kolonialisme Belanda dianggap membuat rusuh dan mengganggu ketertiban (Sartono Kartodirdjo, 1992:170).

Berakhirnya Masa Nonkooperatif

Aksi politik agitasi Soekarno semakin meningkat terutama pada awal tahun 1923-sampai dengan pertengahan tahun 1933 Periode antara awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933

Di lain pihak kekuatan-kekuatan organisasi perjuangan tidak dapat terintegrasi sehingga gerakan nasionalis sebagai usaha untuk mengganyang kolonialisme Belanda menjadi kontra produktif dan bahkan dalam rangka kondisi ekonomis serta situasi politik menuju ke perbenturan kekuatan antara kaum nasionalis dengan kekuasaan kolonial. Akselerasi aktivitas pada satu pihak hanya memancing reaksi politik serta tindakan yang semakin reaksioner pada pihak lain. Hal ini direspon oleh pemerintah Gubernur Jendral de Jong dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menumpas radikalisasi dan agitasi massa bahkan menumpas semua bentuk gerakan politik non-kooperasi yang diperjuangkan oleh kaum

nasionalis. Dengan demikian gerakan-gerakan Partindo, PNI baru dan lainnya di awasi dengan sangat ketat.

Gerakan aksi massa Soekarno selama pertengahan tahun 1932-1933 mengalami perkembangan pesat. Jumlah anggotanya naik dari 4.300 menjadi 20.000 orang. Dalam periode ini rapat-rapat lebih meningkat. Soekarno mengelilingi daerah-daerah di Jawa Tengah yang merupakan cabang-cabang Partindo dan berpidato bersama Gatot Mangkoepredja dan Almasyah. Poko-pokok pidatonya Soekarno tentang marheanisme, sosial-nasionalisme, dan Indonesia merdeka (Sartono Kartodirdjo, 1992).

Upaya Tokoh Nasional Membangun Sistem Kenegaraan Awal Kemerdekaan Indonesia

Menurut Sartono Kartodirdjo (1992) pergerakan nasional merupakan suatu konsep kehidupan yang menunjukkan proses historis dari kelahiran sampai pada perkembangan nasionalisme. Lebih jauh, Sartono Kartodirdjo (1992) menegaskan bahwa dalam mempelajari nasionalisme, tampak jelas ada pertumbuhan konsep yang besar dan pendekatan-pendekatannya bermacam-macam. Dengan demikian hal ini dapat dijelaskan bahwa nasionalisme dalam beberapa pengertian kelahiran dan perkembangannya bersifat historis, sehingga sejarah pergerakan nasional menjadi inti untuk melakukan penyelidikan tentang nasionalisme. Dengan demikian sifat-sifat, tampak bentuk, dan akibatnya berbeda-beda tergantung pada keadaan-keadaan historis (Sartono Kartodirdjo, 1992:243),

Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme menitikberatkan pada subjektifitas misalnya *group consciousness*, *we-sentiment*, *corporet will*, dan bermacam-macam fakta mental lainnya. Nasionalisme pada fase ini belum memasukkan unsur-unsur objektif dari realitas historis yang konkret, seperti negara, teritorium, bahasa, dan tradisi bersama. Faktor-faktor objektif dari nasionalisme selama periode ini belum menjadi kenyataan-kenyataan historis, tetapi baru merupakan fakta-fakta konseptual. Dengan demikian, pembicaraan tentang nasionalisme pada periode pembentukannya

ini lebih terarah dan ditekankan pada unsur-unsur subjektifnya.

Oleh beberapa penulis, nasionalisme dianggap sebagai faktor sosio psikologi. K.Lamprech (1920) memakai istilah sebagai *social souls*; F. Meinecke (1901) menyebutnya sebagai “sejumlah perasaan dan ide yang kabur”; Brinton (1950) menganggapnya sebagai *a sense of belonging*; dan Kohn (1944) melihatnya sebagai *State of mind and an act of consciousness*. Istilah-istilah yang digunakan para penulis ini menunjukkan bahwa nasionalisme dapat dilihat sebagai fakta sosio-psikologis, terutama pada tingkat pembentukannya, seperti yang terjadi pada zaman pergerakan nasional. Sehingga kesadaran kelompok, sentimen dan kehendak kelompok yang dinyatakan pada berbagai organisasi nasional, merupakan wujud institusionalisasi tindakan kelompok (J.D Legge, 1993).

Aspek Kognitif

Tiap-tiap tindakan manusia mencakup beberapa unsur pengenalan yang memungkinkan orang mencari penyesuaian atau/dan perwujudan situasi yang dialaminya. Pengenalan situasi sosial pada masyarakat kolonial harus dicari ke belakang ke masa-masa sebelum pergerakan nasional. Misalnya, gerakan emansipasi perempuan yang dipelopori oleh R. A. Katini melalui surat-suratnya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya berada di dalam transisi perubahan zaman dan hanyut bersama transisi tersebut namun ikut serta dalam perubahan dunia pada saat itu.

Aspek Orientasi Nilai/Tujuan

Aspek orientasi nilai/tujuan berhubungan erat dengan persoalan yang perlu diperhatikan, yaitu persoalan mengenai ide teleologis Pergerakan Nasional, yang dinyatakan sebagai tujuan organisasi nasionalis dan yang menjadi dasar tindakan-tindakannya. Dilihat dari kriteria kebebasan dan kesatuan nasional sebagai unsur-unsur esensial dari nasionalisme sehingga tujuan Pergerakan Nasional mengalami satu kemajuan.

Aspek Afektif

Bersama-sama dengan berbagai bentuk kesadaran dan konfrontasi rasional dalam menghadapi situasi kolonial kita masih dapat menunjukkan beberapa masalah psikologis sebagai hasil dari kondisi-kondisi sosial pada masyarakat kolonial, tetapi tidak dikaitkan secara langsung dengan akal. Masalah psikologi yang timbul pada masyarakat kolonial pada umumnya adalah merasa termarginal, teralienasi, perasaan benci, dan sebagainya.

Pertentangan Antara Para Tokoh Nasional Di Tengah Perubahan Sistem Kenegaraan Indonesia

Sebelum tahun 1908 perjuangan bangsa Indonesia dalam mengganyang kolonialisme bersifat kedaerahan—belum terbentuk sebuah organisasi pergerakan yang modern sehingga perjuangan yang dilakukan menitikberatkan pada kepemimpinan namun ketika tahun 1908 sampai proklamasi kemerdekaan, perjuangna yang dilakukan telah melalui organisasi-organisasi pergerakan dan tidak ada lagi ketergantungan kepada seorang pemimpin.

Adapun faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang kolonialisme. Faktor internal dipengaruhi oleh penderitaan akibat praktek-praktek kolonialisme yang menumbuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Di samping itu, politik Etis yang menumbuhkan golongan cendekiawan dan menjadi pelopor pergerakan nasional. Sedangkan faktor eksternal adalah kemenangan Jepang melawan Rusia dalam perang tahun 1905 dan adanya pergerakan nasional di negara lain seperti India, Fillipina, Cina, dan Turki.

Petisi Soetardjo

Isi dari petisi Sutardjo Kartohadikusumo secara garis besar adalah tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Petisi tersebut bertujuan membuat

suatu rencana untuk mengusulkan kepada pemerintah kolonel agar supaya Indonesia dapat mendirikan pemerintahan sendiri dan dimasukkan dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda (M.C. Ricklefs, 2008:410).

Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Pada tahun 1939 gerakan politik kaum nasional mulai mendapatkan arah baru. Hal ini terinspirasi oleh petisi Soetardjo. Meskipun petisi tersebut ditolak, namun dapat mempengaruhi gerakan politik nasioanal yang sebelumnya ringkih oleh karena politik non-kooperasi yang di lumpuhkan, gerakan kaum nasioanal kemudian terakomodir dan dapat membangun kerja sama di antara partai-partai politik Indonesian dan berupaya memperjuangkan hak memnentukan nasib sendiri dan persatuan Indonesia yang dirumuskan dengan semboyan Indonseia Berparlemen (M.C. Ricklefs, 2008:415).

Mosi Thamrin

Tujuan dari Mosi Thamrin ialah untuk mengubah istilah-istilah yang disematkan oleh pemerintahan Hindia Belanda terhadap orang-orang pribumi Indosensia, khususnya di dalam dokumen-dokumen pemerintah. Keberatan pemerintah terhadap mosi ini adalah bahwa perubahan istilah itu membawa implikasi politik dan ketatanegaraan, seperti apa yang termaktub dalam UUD Kerajaan Belanda. Di samping itu, ada argumentasi ilmiah ialah bahwa Indonesia bukan nama geografis, dan bangsa Indonesia juga tidak menunjukkan pengertian etnologis. (M.C. Ricklefs, 2008:403).

Dampak dari Petentangan Para Tokoh Nasional dalam Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Hal ini merupakan suatu perspektif yang Eropa sentris yang melihat perkembangan di Indonesia sebagai bagian perkembangannya sejarah barat pada umumnya. Tetapi, bagi Sjahrir dan kawan-kawannya, semua ini adalah satu. Penjajahan terhadap Indonesia dilihat sebagai produk krisis kapitalisme Eropa. Begitu pula dengan fasisme. Dengan

latar belakang itu, bagi para pengamat yang radikal di Hindia, peristiwa-peristiwa pada dasawarsa 1930, konsolidasi fasisme di Italia dan kebangkitan Nazi di Jerman, menimbulkan serangkaian masalah yang kritis.

Negara-negara demokrasi mempunyai tatanan ekonomi yang kapitalistis, dan sebagai akibatnya, tidak adil dalam distribusi kekayaannya, tidak mampu menanggulangi krisis ekonomi, dan penuh dengan kontradiksi khususnya antara persamaan formal dan ketimpangan dalam bidang materi. Demokrasi politik saja tidak cukup. Dan, sifat kapitalis negara-negara demokrasi berkaitan dengan kebutuhan mereka akan imperium dan penindasan mereka terhadap penduduk jajahan mereka. Pemecahannya, menurut teori-teori tentang imperium yang dianut pada masa itu, terletak pada upaya untuk mengadakan perubahan sosial di negara penjajah sehingga imperium tidak diperlukan lagi dan daerah-daerah jajahan dapat dibebaskan. Tetapi sementara itu, dan dengan segala kekurangannya, negara-negara kapitalis di Eropa barat setidaknya-tidaknya secara formal adalah demokrasi. Dan demokrasi merupakan hal yang amat penting. Krisis abad ini adalah bentrokan antara demokrasi dan fasisme.

Paling tidak terdapat tiga tujuan Belanda melakukan serangan terhadap Indonesia sejak tanggal 20 Juli 1947. Ketiga tujuan itu adalah *pertama*, tujuan politik, yaitu pengepungan ibukota Republik Indonesia dan secara *de facto* Belanda menghapus atau menghilangkan Republik Indonesia dari peta; *kedua*, tujuan ekonomi yang dicapai dengan cara merebut dan menguasai daerah-daerah penghasil bahan makanan (daerah-daerah penghasil beras seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan bahan ekspor, terutama komoditi perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera, serta menguasai pertambangan di Sumatera. *Ketiga*, tujuan penghancuran militer (TNI) bangsa Indonesia (G. Moedjanto, 1993).

Kesimpulan

Peranan para tokoh nasional Indonesia dalam upaya membangun sistem kenegaraan yang ideal terutama pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, sangat dibutuhkan untuk memperbaiki bahkan mengubah sistem

kenegaraan lama buatan kolonial Belanda menjadi sistem kenegaraan yang khas Indonesia dengan memerhatikan berbagai aspek terutama masalah pluralisme di Indonesia dalam bidang, agama, bahasa, suku, ras dan golongan, baik politik, sosial maupun budaya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pertentangan para tokoh nasional di tengah upaya perubahan sistem kenegaraan Indonesia adalah pada dasarnya pertentangan tidak dilihat sebagai salah satu faktor negatif dalam sebuah proses perjuangan, namun pertentangan dalam tulisan ini dilihat dari sisi positifnya bahwa perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh nasional dalam upaya memperbaiki sistem kenegaraan Indonesia ke depan adalah membutuhkan berbagai sudut pandang yang tentu pasti memiliki perbedaan.

Dampak yang ditimbulkan dari pertentangan tersebut terutama dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, adalah semakin lemahnya sistem perjuangan yang dibangun oleh para tokoh nasional Indonesia, terutama perjuangan melalui bidang politik.

Dampak lain yang ditimbulkan akibat pertentangan dari para tokoh nasional dalam membangun sistem kenegaraan yang baru setelah kemerdekaan adalah lahirnya Agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia sebagai tanda bahwa kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara *de facto* diakui, namun secara *de jure* kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008*, (terjemahan Tim Serambi), Jakarta : Serambi
- _____, 1999, *Pedoman Penyusunan Proposal Untuk Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Sejarah*, Depok : PS Ilmu Sejarah, PPs UI.
- _____, 1993, *New Rules for Sociological Method*, Second Edition,

- Stanford University Press, Stanford, CA.
- Anderson, Benedict, 1988. *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944 – 1946*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bloch, Marc. 1988. *Pleidooi voor de Geschiedenis of Geschiedenis Als Ambacht*, Nederlandse Vertaling, SUN, Nijmegen.
- Damayanti Desi. 2007. *Mengenal Pahlawan Bangsa*. Jakarta : Pustaka Phoenix.
- Ebenstein W Fogelman. 1987. *Isme-isme Dewasa Ini*. Jakarta : Erlangga
- Fredrick, William H. 1989. *Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia, (Surabaya 1926 – 1946)* (terjemahan Hermawan Sulisty), Jakarta : Gramedia.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*, Press Polity, Cambridge.
- Hariyono. 2008. *Penerapan Status Bahaya di Indonesia*, Jakarta : Pensil.
- Ingleson, J. 1979. *Road to Exile : The Indonesian Nationalist Movement 1927 – 1934*, Singapore.
- Ismaun, H. 2005. *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, Bandung : Historia Utama Press-Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Legge, J. D. 1993. *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*, (terjemahan Hasan Basari), Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Leirissa, R.Z. 1997. *Metodologi Strukturis, Pengantar*. Depok : PS Ilmu Sejarah PPs UI.
- Lloyd, Christopher. 1993. *The Structures of History*, London : Basil Blackwell.
- Matroji. 2008. *Lahirnya paham baru di dunia (bagian Sosialisme)*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mrazek, Rudolf. 1996. *Sjahrir-Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Musanef. 1982. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nasution, Abdul Haris. 1971. *Tentara Nasional Indonesia*, Jakarta : Seruling Masa.
- Parmudji, S. 1982. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Penulis, T., Nuriyati, T., Falaq, Y., Deni Nugroho, E., Harapin Hafid, H., Fathimah, S., Ardiansyah, R., Firmansyah, H., Saragih, E., Nofriyaldi, A., Komar, A., Palangda, L., Nurhafari, A., & Sri Wahyuni, N. (2022). *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (TEORI & APLIKASI)*. www.penerbitwidina.com
- Ricklefs, M. C. 1989. *Sejarah Indonesia Modern*, (terjemahan Dharmono Hardjowidjono), Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Rodee, dkk. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sastrosatomo, Soebadio. 1987. *Perjuangan Revolusi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sudiyo. 2000. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suryaningrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta : Dewaruci Press.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*, Reading-Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Press.
- Wulan, Genoveva Ambar. 2008. "Pertentangan Soekarno Vs Sutan Sjahrir di masa Peralihan Kekuasaan (Dari Sistem Presidensiil ke Sistem Parlementer dalam Tinjauan Pendekatan Strukturisme)" dalam *Djoko Marihandono (Penyunting) Titik Balik Historiografi Indonesia*. Jakarta : Wedatama Widya Sastra bekerja sama dengan Departemen Sejarah FIB UI.

